

## KAMPANYE ANTIKORUPSI MELALUI MEDIA SOSIAL

**Kurniawaty Yusuf**  
Universitas Paramadina

[kurniawaty.yusuf@paramadina.ac.id](mailto:kurniawaty.yusuf@paramadina.ac.id)

### Abstrak

Universitas Paramadina telah 10 tahun menyelenggarakan matakuliah Antikorupsi sebagai matakuliah wajib sejak tahun 2008, dengan muatan 3 SKS (Satuan Kredit Semester). Matakuliah ini merupakan implementasi dari salah satu pilar yang harus dimiliki oleh alumni Paramadina, yaitu *ethics* (moral), selain *leadership* dan *entrepreneurship*. Matakuliah antikorupsi, merupakan kepedulian Universitas Paramadina sebagai salah satu lembaga pendidikan yang bertanggungjawab menghasilkan generasi penerus yang antikorupsi. Meskipun tidak menjamin mahasiswa melakukan tindak korupsi di kemudian hari, tetapi melalui pendidikan antikorupsi, mahasiswa mampu menyadari, dan memahami perilaku yang menjurus ke korupsi dan akibatnya. Sehingga mahasiswa memiliki pilihan, dan pertimbangan untuk tidak melakukan tindak korupsi. Salah satu metode pembelajaran yang digunakan dalam matakuliah antikorupsi adalah kampanye antikorupsi melalui media sosial. Metode ini berusaha mengakomodir kesukaan mahasiswa akan media digital, dan mengapresiasi kreativitas mahasiswa dalam menterjemahkan konsep antikorupsi melalui perspektif anak muda. Di sisi lain, Universitas Paramadina terbantu untuk mempromosikan matakuliah antikorupsi, yang merupakan salah satu matakuliah unggulan. Penulisan makalah ini, menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti ingin menggambarkan pembelajaran mahasiswa dengan menggunakan metode kampanye antikorupsi berbentuk twibbon, poster, cerita pendek (video), dan *interactive game*, yang diunggah melalui media sosial instagram dan facebook. 5 tahapan kampanye yang digunakan untuk menganalisis kampanye antikorupsi, menggunakan *strategy*, *tactics*, *timescales*, *evaluations*, dan *review*, menunjukkan bahwa metode kampanye antikorupsi melalui media sosial direspon dengan baik oleh mahasiswa yang melaksanakan kampanye dan anak muda yang menyaksikan kampanye.

**Kata Kunci : antikorupsi, kampanye, media sosial**

### PENDAHULUAN

Tahun 2008, Universitas Paramadina bekerjasama dengan salah satu NGO (*NonGovernment*) bernama TIRI berkedudukan di Inggris untuk melakukan gerakan integritas (*integrity*) dengan melibatkan berbagai pendidikan tinggi di Indonesia. Karena kondisi Indonesia pada saat itu lagi marak dengan kasus korupsi, sehingga dianggap paling sesuai dan mudah dipahami untuk gerakan integritas adalah gerakan antikorupsi. Universitas

Paramadina bersama dengan TIRI mengadakan berbagai program untuk gerakan integritas melalui pelatihan antikorupsi, bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia, negeri maupun swasta. Universitas Paramadina berkumpul bersama dosen-dosen yang mewakili fakultas dan program studi dari berbagai perguruan tinggi untuk mendiskusikan bagaimana jika antikorupsi dimunculkan sebagai matakuliah dalam

perguruan tinggi. Hasil diskusi tersebut, menghasilkan beberapa masukan yang diterima oleh Universitas Paramadina sebagai berikut : bahwa pembahasan tentang atikorupsi dapat dilakukan pada beberapa pertemuan untuk matakuliah yang membahas mengenai *ethics* profesional kerja, menyisipkan pembahasan antikorupsi pada satu pertemuan kuliah dimana pokok pembahasan dapat dikaitkan dengan kasus korupsi, mendirikan pusat studi terkait gerakan antikorupsi, pemilihan bidang ilmu tertentu untuk mempelajari antikorupsi seperti fakultas hukum yang memang akan bersinggungan dengan pembahasan korupsi, dan mengaktifkan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang bisa mengarah pada gerakan antikorupsi. Keterbatasan lain bagi perguruan tinggi untuk mengimplementasikan antikorupsi sebagai matakuliah karena belum ada dukungan dari pihak-pihak pemegang kekuasaan di lingkungan perguruan tinggi, karena disinyalir praktek korupsi dan gratifikasi di beberapa perguruan tinggi masih terjadi, sehingga pengadaan matakuliah antikorupsi dianggap menjadi batu sandungan untuk praktek korupsi. Semua masukan di atas, menunjukkan betapa sulitnya antikorupsi diwujudkan dalam satu matakuliah wajib, yang dapat dipelajari oleh setiap mahasiswa. Universitas Paramadina memahami, begitu antikorupsi menjadi matakuliah, mahasiswa akan menjadi cerdas dan kritis untuk memahami kondisi yang termasuk dalam perbuatan korupsi, sehingga civitas akademika (dosen dan karyawan) harus bersiap diri menjadi teladan utama untuk mewujudkan semangat antikorupsi dalam mendukung pendidikan antikorupsi di Universitas Paramadina.

Pada tahun yang sama kasus korupsi untuk penyelewengan dana, kasus *mark up*, dan kasus suap meningkat. Salah satu yang mendukung pernyataan tersebut adalah Direktur Pusat Kajian (Pukat) Korupsi Universitas Gajah Mada (UGM), Zainal Arifin Muchtar, SH, LLM. kepada wartawan. Pelaku korupsi terbagi dalam tiga kelompok besar yakni anggota dan mantan anggota DPRD, pejabat dan mantan pejabat daerah, dan kalangan swasta. Dimana pelaku korupsi yang terbanyak adalah anggota dan mantan anggota DPRD sebanyak 89 orang, pejabat dan mantan pejabat daerah sebanyak 65 orang, dan dari swasta atau rekanan, sebanyak 40 orang. Modus korupsi yang paling sering dilakukan adalah penyalahgunaan anggaran yang mencapai 87 kasus, sedangkan korupsi pemerintah daerah dengan 52 kasus, pengadaan barang dan jasa, serta sector pendidikan juga paling banyak ditemukan kasus korupsi (<https://news.detik.com/berita/1063958/korupsi-tahun-2008-paling-banyak-penyelewengan-dana-apbd>, akses 20 Februari 2019, pukul 19.00 wib). Data lain adalah sejak tahun 2004 hingga 2008, berkas pengaduan masyarakat yang diterima sebanyak 31.404 berkas, sebanyak 31.096 pengaduan telah selesai ditelaah, 4.078 pengaduan dapat ditindaklanjuti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sedangkan 22.022 pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti (<https://www.viva.co.id/arsip/57744-data-korupsi-tahun-2008>, akses 20 Februari 2019, pukul 19.30 wib). Karena meningkatnya kasus korupsi pada tahun 2008, ditambah alasan bahwa pelaku korupsi kebanyakan adalah lulusan perguruan tinggi, bermakna mereka adalah orang-orang cerdas, punya potensi untuk menjadi profesional di bidang

pekerjaannya, tetapi melakukan tindak korupsi, yang dapat merugikan lingkungan kerja, masyarakat, bahkan negara. Semakin meningkatnya kasus korupsi di Indonesia, dimana hampir semua pelakunya adalah lulusan pendidikan tinggi, menjadi salah satu alasan bagi Universitas Paramadina untuk ikut bertanggung jawab menghasilkan sarjana generasi penerus bangsa yang memiliki tanggungjawab, profesional kerja, berdaya saing tinggi, dan berintegritas. Anies Baswedan, PhD. yang menjabat Rektor Universitas Paramadina saat itu mengungkapkan betapa pentingnya perguruan tinggi sebagai penghasil generasi penerus ikut bertanggungjawab untuk memulai gerakan pencegahan (*preventif*) untuk kegiatan korupsi di lingkungan anak muda melalui pendidikan antikorupsi. Kalau bukan kita sebagai pendidik, lalu siapa lagi. Lembaga pendidikan, dalam hal ini pendidikan tinggi adalah tempat yang terbaik bagi anak muda untuk aktif, kritis, dan kreatif, belajar memikirkan persoalan yang dihadapi bangsanya. Permasalahan utama yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia saat ini adalah maraknya tindak korupsi. Tindak korupsi harus dilawan dengan pendidikan antikorupsi yang membekali setiap mahasiswa untuk kritis dan mampu memiliki pilihan yang tepat jika dihadapkan pada suatu permasalahan, sehingga mampu mengatasi beragam permasalahan terkait *ethics*, apalagi dihadapkan pada situasi korupsi.

Menurut Mahfud MD., 95 persen koruptor di Indonesia adalah lulusan perguruan tinggi. Ini terjadi karena dunia pendidikan di Indonesia sekarang mengalami *disorientasi*. Semakin tinggi pendidikannya, semakin canggih pula cara korupsinya. Menurut Mahfud, pendidikan kita selama ini hanya mampu melahirkan

orang-orang pandai tetapi tidak terdidik. Pendidikan hanya fokus pada kepandaian otak, tetapi tidak membangun watak, dan hati manusia, sehingga banyak orang pandai tetapi hatinya jahat, yang ujung-ujungnya justru menjadi beban bagi negara. "Pandai otaknya tetapi tidak bermoral". Dalam banyak fakta, Mahfud menyebutkan, perguruan tinggi hanya menjadi tempat mencetak sarjana, bukan melahirkan kaum intelektual atau orang terdidik yang memiliki sikap cendekiawan sebagaimana tujuan utamanya. "Saat ini Indonesia membutuhkan sarjana yang intelektual, sarjana yang cendekiawan. Sarjana intelektual yang selaras dengan kepandaian otak dengan hati, dan wataknya, tutur Mahfud MD. (<https://news.okezone.com/read/2012/08/31/373/683436/95-koruptor-ri-lulusan-perguruan-tinggi>, akses pada 20 Februari 2019, pukul 20.30 wib).

Lulusan Universitas Paramadina harus memiliki tiga kemampuan, yaitu *leadership* (kepemimpinan), *entrepreneurship* (kewirausahaan), dan *ethics* (moral) yang diterjemahkan pada beberapa matakuliah wajib dan kegiatan kemahasiswaan yang diwajibkan. Pelatihan kepemimpinan diberikan pada saat mengikuti *leadership camp* yang diwajibkan untuk setiap mahasiswa baru, saat awal perkuliahan. Selain itu adanya *dual* transkrip yang menuntut mahasiswa untuk wajib dan aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan dan organisasi di dalam dan di luar kampus, menuntut kemampuan mahasiswa untuk menjadi *leader* yang aktif. Untuk program *dual* transkrip, setiap mahasiswa harus mengumpulkan 20 poin bagi mahasiswa kelas malam (karyawan), 40 poin bagi mahasiswa regular, 60 poin bagi mahasiswa dengan beasiswa, yang wajib dipenuhi jumlah poinnya sebelum

mengambil sidang skripsi. Sementara untuk *entrepreneurship* diimplementasikan dalam matakuliah kewirausahaan, selain itu matakuliah ini juga didukung kegiatan kewirausahaan yang dilakukan mahasiswa pada saat-saat tertentu. Sementara untuk *ethics* secara khusus yang mewarnai ciri khas matakuliah di Paramadina belum terwakilkan.

Pemaparan sebelumnya merupakan alasan yang paling tepat bagi Universitas Paramadina untuk mengambil keputusan memberlakukan matakuliah wajib antikorupsi dengan dua SKS untuk seluruh mahasiswa Universitas Paramadina. Bukan hal yang mudah bagi civitas akademika Universitas Paramadina mengimplementasikan matakuliah antikorupsi, tetapi berkat dukungan semua pihak yang ikut terlibat dalam proses ini, segalanya berjalan lancar. Universitas Paramadina belajar lebih banyak dalam mempersiapkan matakuliah antikorupsi dan bekerjasama dengan pihak TIRI, KPK, ICW (Indonesia *Corruption Watch*), Pusat Studi Paramadina Public Policy yang salah satu programnya adalah integritas dan antikorupsi. Langkah selanjutnya, Universitas Paramadina yang diwakili oleh Ir. Wijayanto Samirin, MPP, sebagai Deputi Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Bisnis, bekerjasama dengan berbagai pihak untuk menulis dan menerbitkan buku mengenai “Korupsi Mengorupsi Indonesia” yang ditulis berbagai pihak, dengan latar belakang profesi yang berbeda dalam membahas korupsi. Buku yang diterbitkan oleh Gramedia ini, menandai pertama kalinya matakuliah antikorupsi diajarkan di Universitas Paramadina, karena buku tersebut digunakan sebagai *referensi* utama. Dosen pengajar matakuliah antikorupsi adalah dosen tetap Universitas

Paramadina yang mengikuti berbagai pelatihan untuk persiapan mengajar matakuliah tersebut. Ditunjuk pula koordinator matakuliah antikorupsi, Asriana Issa Sofia, MA., yang membantu mempersiapkan materi belajar mengajar, mengkoordinir dosen pengajar, menentukan metode pengajaran, dan mengontrol proses kuliah dari awal hingga akhir.



Gambar 1. Buku Korupsi Mengorupsi Indonesia



Gambar 2. Launching buku Korupsi Mengorupsi Indonesia

Kendala awal dalam mengajar matakuliah antikorupsi adalah mengimplementasikan materi antikorupsi agar supaya mudah diterima, dan dipahami

oleh para mahasiswa. Selain itu pemilihan metode pengajaran yang tepat, ikut berperan penting untuk membuat matakuliah ini menjadi menarik diikuti oleh mahasiswa. Metode pengajaran yang digunakan adalah presentasi, diskusi, kerja kelompok dalam menyelesaikan kasus-kasus antikorupsi, kuliah umum dengan mendatangkan pihak KPK untuk berbagi pengalaman menangani kasus korupsi, menonton, dan menganalisa kasus antikorupsi melalui film yang disiapkan oleh TIRI dan ICW bekerjasama dengan KPK. Selanjutnya kunjungan ke Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) untuk melihat langsung sidang korupsi, dan melakukan investigasi mengenai *pitty corruption* di lingkungan sekitar yang harus dipresentasikan di depan seluruh mahasiswa yang mengambil matakuliah antikorupsi, disaksikan seluruh dosen antikorupsi dan beberapa pihak yang memberikan penilaian langsung terhadap hasil investigasi para mahasiswa. Pihak yang hadir tersebut adalah TIRI dan KPK. Metode pengajaran matakuliah antikorupsi terus mengalami perkembangan yang berarti, mahasiswa semakin kritis, kreatif, dan aktif dalam membuat investigasi korupsi. Bahkan civitas akademika, khususnya karyawan Paramadina (baik struktural, dosen, maupun karyawan) harus siap dengan sikap kritis mahasiswa terhadap hal-hal yang diduga menjurus ke tindakan korupsi. Perubahan di pihak karyawan Paramadina semakin membaik, karena mereka berusaha memberikan keteladanan, lebih *transparency* (terbuka) untuk hal-hal yang diperlukan, dan menjaga integritas. Hal ini membantu civitas akademika memberikan *service excellent* bagi mahasiswa dan pihak-pihak lain. Di kalangan mahasiswa pun sering dilakukan

kampanye menjelang UTS (Ujian Tengah Semester) dan UAS (Ujian Akhir Semester) mengenai nilai-nilai antikorupsi, seperti kejujuran, tanggung jawab, kerja keras dan lain-lain. Bahkan mahasiswa membuat Komunitas Pemuda Antikorupsi (KOMPAK) Paramadina, yang bekerjasama dengan beberapa kegiatan yang diselenggarakan KPK untuk komunitas anak muda.



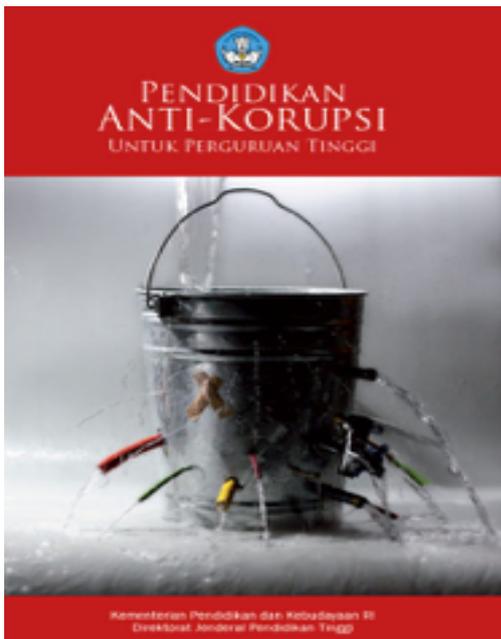
Gambar 3. Kampanye mahasiswa menjelang UTS dan UAS di Universitas Paramadina



Gambar 4. Komunitas Pemuda Antikorupsi (KOMPAK) Paramadina melakukan kampanye

Setelah beberapa tahun menjalankan pendidikan antikorupsi di Universitas Paramadina, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Pendidikan Tinggi bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, termasuk Universitas Paramadina menghasilkan satu buku

mengenai Pendidikan Antikorupsi Untuk Pendidikan Tinggi. Buku yang dikenal dengan modul ini, dikhususkan untuk dosen-dosen pengajar antikorupsi. Dari universitas Paramadina, yang mengikuti proses pembuatan modul ini adalah koordinator matakuliah pendidikan antikorupsi. Melalui kerjasama ini pula, dosen pengajar antikorupsi dapat mengikuti berbagai pelatihan untuk pengayaan materi dan metode pembelajaran antikorupsi.



Gambar 5. Modul untuk dosen mengajar pendidikan antikorupsi

Tahun 2018, merupakan tahun ke sepuluh perjalanan matakuliah antikorupsi di Universitas Paramadina. Peringatan 10 tahun pendidikan antikorupsi diwarnai dengan berbagai even, seperti dialog, seminar nasional, *talk show*, *fashion show*, bedah buku, diskusi, pameran, dengan tema antikorupsi. Seperti tahun sebelumnya, tahun 2018 Universitas Paramadina kembali memenuhi undangan KPK untuk mengikuti pameran antikorupsi dalam menyambut perayaan Hari

Antikorupsi Sedunia mewakili bidang pendidikan.



Gambar 6. Dialog kemitraan mengenai antikorupsi



Gambar 7. Seminar perempuan dan antikorupsi, sekaligus *fashion show*.



Gambar 8. Rangkaian memperingati hari antikorupsi sedunia 2018, pameran bersama KPK dan merayakan hari antikorupsi sedunia melalui kampanye di media sosial.

Materi pengajaran antikorupsi ikut mengalami banyak perubahan, dimana materi pembelajaran dibuat lebih ringan, mudah dipahami, dan dilengkapi dengan berbagai kasus-kasus menarik mengenai korupsi, yang dapat diterima oleh mahasiswa. Metode pengajaran juga lebih variatif, seperti pameran foto, poster dengan tema antikorupsi, membuat *quote* antikorupsi, membuat poster antikorupsi, dan melakukan pameran antikorupsi, membuat permainan (*games*) antikorupsi, membuat kampanye terkait gerakan antikorupsi yang dilakukan mahasiswa di internal kampus Paramadina, membuat film singkat mengenai antikorupsi, *role play* untuk konsep antikorupsi. Hal yang menarik dari pertambahan metode pengajaran matakuliah antikorupsi adalah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa terkait antikorupsi, dikampanyekan melalui media sosial. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai metode pembelajaran

kampanye antikorupsi yang dilakukan mahasiswa melalui media sosial.

## METODE

Penelitian mengenai kampanye antikorupsi di media sosial menggunakan metode kualitatif. Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya untuk menjelaskan fenomena yang diteliti. Peneliti ikut aktif dalam menentukan jenis data yang diinginkan, dengan demikian, peneliti menjadi instrumen penelitian yang harus terjun langsung di lapangan. Karena penelitian bersifat subjektif dan hasilnya lebih *kasuistik* bukan untuk digeneralisasikan (Kriyantono, 2009:56-57). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan melakukan deskripsi detail dari topik yang diteliti (Kriyantono, 2009:66). Analisis data dilakukan secara deskriptif, bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu (Kriyantono, 2009:67). Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi merupakan kegiatan mengamati yang dapat dilakukan dengan menggunakan perlengkapan panca indera (Kriyantono, 2009:108). Observasi dilakukan peneliti untuk menganalisis beberapa postingan kampanye antikorupsi pada media sosial mahasiswa. Menurut Berger (2000) wawancara adalah percakapan antara peneliti – seseorang yang berharap mendapatkan informasi – dan informan – seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh

informasi langsung dari sumbernya (Kriyantono, 2009:98). Peneliti akan mewawancarai Alfikalia, M.Psi. selaku koordinator dan pengajar matakuliah antikorupsi Universitas Paramadina yang mengetahui pendidikan matakuliah antikorupsi secara menyeluruh. Selanjutnya, peneliti akan mewawancarai Dewi Kurniaty, MM. pengajar dan penggiat antikorupsi di Universitas Paramadina, mahasiswa yang diajar adalah mahasiswa yang menyelenggarakan kampanye antikorupsi melalui media sosial dengan beragam metode. Dokumentasi adalah instrumen pengumpulan data yang sering digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data. Metode observasi dan wawancara sering dilengkapi dengan kegiatan penelusuran dokumentasi. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data. Dokumen bisa berbentuk dokumen publik atau dokumen privat (Kriyantono, 2009:118). Analisis data dimulai dari analisis berbagai data yang telah dikumpulkan peneliti di lapangan melalui observasi, wawancara, dan penelusuran dokumentasi. Kemudian data tersebut diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori tertentu, dan peneliti melakukan pemaknaan terhadap data tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pendidikan Antikorupsi

Selama 10 tahun Universitas Paramadina terus mengembangkan pendidikan antikorupsi dengan dukungan berbagai pihak. Awalnya matakuliah antikorupsi bermuatan 2 SKS, tetapi mulai tahun ajaran gasal 2018/2019, ditingkatkan menjadi 3 SKS. Alasannya bahwa mahasiswa dahulu hanya ditugaskan

membuat investigasi kasus antikorupsi kecil-kecilan (*pitty corruption*) yang terjadi di lingkungan mereka, sehingga jika mahasiswa dibebankan tugas yang lebih besar, muatan 2 SKS dirasakan tidak memadai lagi. Karena matakuliah antikorupsi dengan 3 SKS selain peran mahasiswa diharapkan melakukan tindak pencegahan korupsi di lingkungan masyarakat, mahasiswa juga diharapkan mampu menggerakkan masyarakat untuk menyadari dan memahami gerakan antikorupsi. Gerakan ini dapat dilakukan mahasiswa di dalam maupun di luar kampus. Tujuannya, agar mahasiswa memiliki tanggungjawab sosial untuk *sharing* dan kreatif melakukan gerakan antikorupsi, tidak hanya di lingkungan kampus, tetapi juga terjun langsung ke masyarakat. Mengingat betapa pentingnya peranan anak muda sebagai generasi penerus kedepannya, untuk menentukan Indonesia bebas kasus korupsi.

Materi pembelajaran antikorupsi yang digunakan, senantiasa mengalami perbaikan ke arah yang lebih baik dan sempurna. Modul pembelajaran antikorupsi dari DIKTI dirasakan sulit untuk diterapkan kepada mahasiswa sebagai bahan ajar, dan mahasiswa juga sulit memahaminya, karena sebenarnya modul tersebut diperuntukan bagi dosen pengajar antikorupsi. Sehingga perlu penyesuaian dalam menghadirkan materi antikorupsi yang mudah dipahami dan diterima oleh mahasiswa. Masih dalam proses perbaikan dan pembuatan modul yang sesuai untuk mahasiswa era milenial, Universitas Paramadina bekerjasama dengan KPK untuk mewujudkannya.

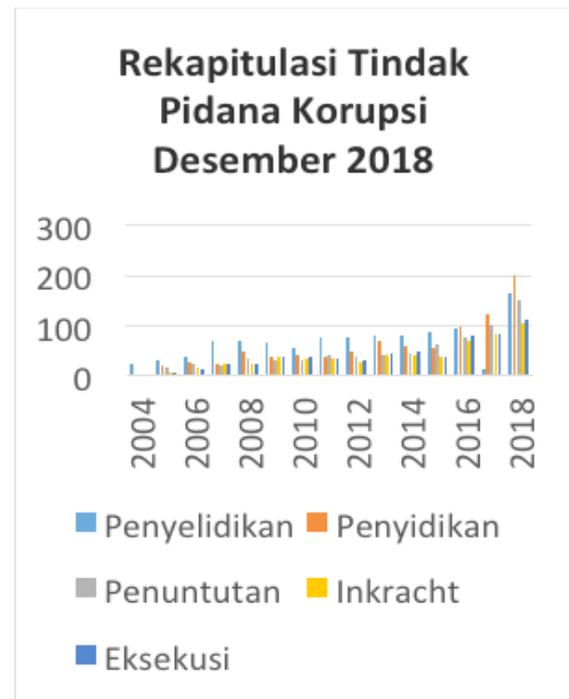
Jumlah pengajar pendidikan antikorupsi di Universitas Paramadina, dari tahun ke tahun bertambah jumlahnya, dahulu dimulai dari dosen tetap, saat ini

dosen *homebase* juga tertarik untuk mengajar antikorupsi. Peningkatan kompetensi dosen pengajar antikorupsi juga rutin dilakukan, melalui berbagai pelatihan, diskusi, seminar, dll. Biasanya para pengajar antikorupsi dikumpulkan oleh Koordinator Mata Kuliah Antikorupsi beberapa kali pertemuan, sebelum memulai matakuliah, saat penyelenggaraan matakuliah, dan evaluasi di akhir semester.

Secara garis besar, matakuliah antikorupsi mengajarkan pengertian korupsi, integritas, nilai, dan prinsip antikorupsi; faktor-faktor penyebab korupsi; dampak massif korupsi; upaya pemberantasan korupsi; tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan dan perkembangannya; gerakan kerjasama dan instrumen nasional pencegahan korupsi; gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi; mahasiswa dan upaya pencegahan korupsi; aspek investigasi, manfaat investigasi, dan teknik melakukan investigasi; korupsi dan pelayanan publik. 14 kali perkuliahan, 2 kali ujian untuk tengah dan akhir semester (UTS dan UAS). Selama 14 kali perkuliahan, metode pembelajaran beragam, khusus kuliah tamu, seminar, presentasi hasil investigasi *pitty corruption*, pameran foto dan poster, kampanye, kunjungan ke Pengadilan Tipikor, dikoordinir oleh dosen matakuliah antikorupsi. Materi pengajaran pendidikan antikorupsi sudah ditentukan berdasarkan rapat bersama tim pengajar antikorupsi, kemudian setiap dosen diberikan kebebasan dalam *delivery* matakuliah antikorupsi kepada mahasiswa. Kelas matakuliah antikorupsi yang merupakan matakuliah wajib, adalah kelas besar dengan jumlah mahasiswa di atas 30.

Perjalanan matakuliah antikorupsi masih berat dan panjang, karena kasus-

kasus korupsi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan terus menerus (<https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>, akses pada 20 Januari 2019 pukul 22.00 wib). Sementara pencegahan melalui pendidikan antikorupsi belum banyak dilakukan perguruan tinggi.



Gambar 9 : Tabel rekapitulasi tindak pidana korupsi, Desember 2018

Munculnya komitmen beberapa lembaga untuk memerangi dan memberantas korupsi di Indonesia, kembali ditunjukkan oleh pemerintah, melalui Menristek-DIKTI, Mohamad Nasir, bersama Ketua KPK Agus Rahardjo, Mendagri Tjahyo Kumolo, Mendikbud Muhadjir Effendy, serta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin untuk menandatangani Komitmen Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi (Selasa 11/12/2018) di Jakarta. Penandatanganan komitmen ini dilaksanakan pada rangkaian acara Rapat

Koordinasi nasional (Rakornas) Pendidikan Antikorupsi yang dilaksanakan sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi dengan mendorong diimplementasikannya pendidikan antikorupsi di setiap jenjang. Implementasi tersebut diwujudkan dengan lahirnya kebijakan dari setiap kementerian terkait insersi pendidikan antikorupsi pada kurikulum pendidikan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memberi dukungan positif dan maksimal untuk pendidikan antikorupsi di berbagai jenjang pendidikan (<https://lldikti1.ristekdikti.go.id/details/apps/1445>., diakses 21 Februari 2019, pukul 21.00 Wib).

Universitas Paramadina sebagai penyelenggara matakuliah antikorupsi, memiliki harapan untuk tetap memberikan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman mengenai penyebab dan dampak buruk yang ditimbulkan korupsi. Sehingga kelak, mahasiswa memiliki pilihan lebih baik untuk tidak melakukan korupsi, ketika menghadapi dunia kerja yang marak dengan tindakan korupsi. Matakuliah ini, bukan jaminan bahwa mahasiswa tidak akan melakukan korupsi di kemudian hari, tetapi matakuliah ini mencoba untuk memberikan pemahaman bahwa korupsi adalah tindakan yang merugikan, bukan hanya untuk diri sendiri yang melakukan korupsi, keluarga akan ikut terbawa-bawa, bahkan masyarakat juga akan terkena dampaknya, meskipun mereka tidak melakukan tindakan korupsi. Sehingga mahasiswa harus menghindari tindakan korupsi.

## 2. Kampanye Antikorupsi

Salah satu metode pembelajaran yang menarik bagi mahasiswa untuk matakuliah

antikorupsi adalah kampanye. Menurut Leslie B. Snyder (2002) *A communication campaign is an organized communication activity, directed at a particular audience, for a particular periode of time to achieve a particular goal*. Sementara Pfau dan Parrot (1993) menyatakan *A campaign is conscious, sustained and incremental process designed to be implemented over a speciefed periode of time for the purpose of influencing a speciefed audience*. Berdasarkan definisi kampanye dapat ditarik kesimpulan pertama, adanya aktivitas proses komunikasi kampanye untuk mempengaruhi khalayak tertentu; kedua, untuk membujuk dan memotivasi khalayak untuk berpartisipasi; ketiga, ingin menciptakan efek atau dampak tertentu seperti yang direncanakan; empat, dilaksanakan dengan tema spesifik dan nara sumber yang jelas; kelima, dalam waktu tertentu atau telah ditetapkan (Ruslan, 1997:23-24).

Jika merujuk pada definisi kampanye, diimplementasikan pada matakuliah antikorupsi adalah : pertama, informasi tugas mahasiswa mengenai kampanye antikorupsi melalui media sosial, disampaikan oleh dosen pada pertemuan pertama perkuliahan antikorupsi, bahwa UAS mereka adalah kampanye antikorupsi di media sosial; kedua, kampanye antikorupsi dilakukan agar mahasiswa tertarik untuk memikirkan gerakan antikorupsi sesuai dengan ide dan kreativitas anak muda agar supaya gerakan antikorupsi juga dipahami oleh anak muda lainnya; ketiga, efek yang diharapkan bahwa anak muda menjadi *aware* mengenai gerakan antikorupsi, mengetahui betapa merugikannya tindakan korupsi bagi orang lain dan masyarakat; keempat, tema yang ditentukan untuk kampanye antikorupsi adalah pencegahan kasus

koruptif yang dapat diimplementasikan mahasiswa sesuai ide dan kreativitas mereka, dengan menargetkan rekan-rekan mahasiswa di media sosial; kelima, waktu penyelenggaraan adalah tiga minggu, satu minggu persiapan, dan dua minggu proses *upload* kampanye antikorupsi di media sosial.

Jenis kampanye antikorupsi berorientasi pada tujuan yang bersifat khusus dan berdimensi pada perubahan sosial (*sosial exchange*) atau disebut *Ideological or Cause – Oriented Campaigns* (Ruslan, 1997:26). Kampanye antikorupsi yang dilakukan mahasiswa untuk pendidikan antikorupsi diharapkan mampu membuat mahasiswa *aware* tentang masalah korupsi yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, dan gerakan antikorupsi ini dapat mahasiswa tularkan ke rekan-rekan mereka melalui media sosial. Sehingga semakin banyak anak muda memahami betapa pentingnya pemahaman tentang antikorupsi sebagai tindakan *preventif* untuk tindakan korupsi dalam berbagai bentuk.

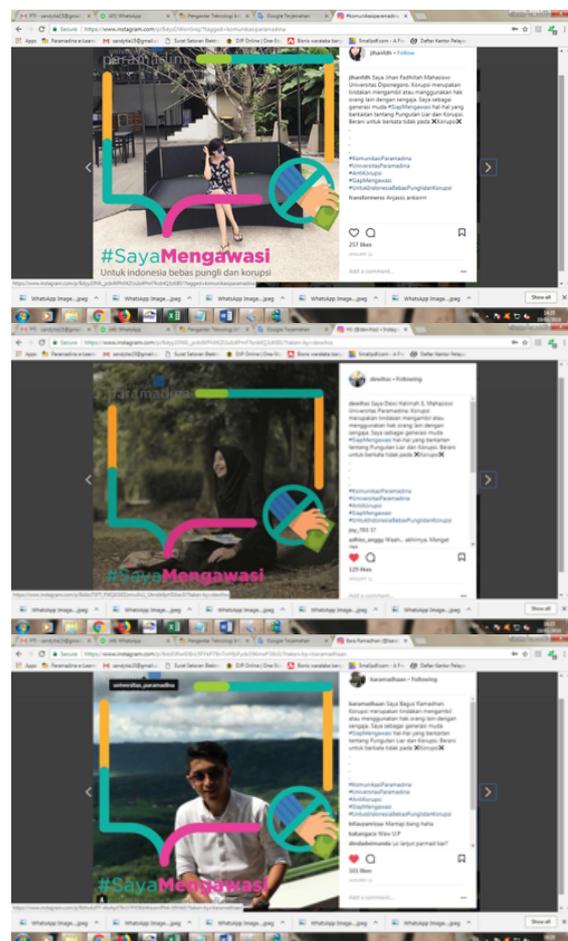
Menurut Gregory (1996) program kampanye yang seringkali dilakukan *Public Relations* melalui 10 tahapan sebagai berikut : satu, *analysis* (analisis); kedua, *objectives* (tujuan); ketiga *public or audience* (public atau khalayak sasaran); keempat, *messages* (pesan-pesan); kelima, *strategy* (strategi); keenam, *tactics* (taktik pelaksanaan); ketujuh, *timescales* (skala waktu); kedelapan, *resources* (sumber daya); kesembilan, *evaluations* (penilaian); kesepuluh, selain evaluasi, terdapat istilah *review* (peninjauan) (Ruslan, 1997: 99-105). Peneliti tidak menggunakan semua tahapan program kampanye untuk menganalisis penelitian kampanye antikorupsi melalui media sosial, tetapi hanya memilih tahapan kampanye yang

akan dianalisis sebagai berikut : pertama, *strategy* (strategi) adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan kampanye dalam kurun waktu tertentu, mengkoordinasikan tim kerja, memiliki tema, dan faktor pendukung lainnya (Gregory, 1996); pertama, *strategy* (strategi); kedua, *tactics* (taktik pelaksanaan) terkait dengan pelaksanaan dan kreativitas; ketiga, *timescales* (skala waktu); keempat, *evaluations* (penilaian); kelima *review* (peninjauan).

**Strategy (strategi)** kampanye yang dilakukan dosen antikorupsi meliputi pertama, dosen antikorupsi membagi kelompok yang terdiri dari 5-6 mahasiswa, yang semuanya harus terlibat aktif. Lalu masing-masing kelompok berdiskusi untuk menghasilkan ide kampanye antikorupsi di media sosial. Dosen memberikan instruksi terkait dengan apa yang harus dilakukan kelompok mahasiswa untuk melakukan antikorupsi di media sosial. Aturannya adalah mahasiswa wajib membuat hastag #10 tahun antikorupsi#, #matakuliah antikorupsi#, dan #universitas paramadina# untuk semua postingan yang dibuat di media sosial selama rangkaian kampanye antikorupsi, jika ingin menambahkan hastag diperbolehkan, tetapi tidak menghilangkan hastag yang wajib. Kedua, tema untuk kampanye antikorupsi adalah tindakan pencegahan antikorupsi di lingkungan masyarakat yang mudah dipahami, diterima, dan disukai oleh anak muda. Untuk implementasi tema tersebut, harus disesuaikan dengan target anak muda. Sehingga media sosial yang dipilih untuk mengunduh kampanye antikorupsi adalah Instagram, adalah media sosial yang paling digandrungi oleh anak muda untuk saat ini. Walaupun ada juga yang menggunakan facebook. **Tactics**

(taktik pelaksanaan) kampanye antikorupsi terbagi menjadi : twibbon, poster, film pendek, gambar, *interactive game*. Ketiga, semua ide kreatif yang dihasilkan kelompok harus diunduh ke media sosial. Media sosial yang dipilih adalah instagram dan facebook, karena mayoritas mahasiswa memiliki kedua media sosial tersebut, dan target market anak muda, masih dipenuhi oleh kedua media sosial tersebut.

Kampanye antikorupsi yang dibuat oleh kelompok mahasiswa Universitas Paramadina : pertama, kampanye antikorupsi dengan menggunakan postingan twibbon. Twibbon adalah bingkai foto yang dibuat dengan sedemikian rupa yang ditujukan untuk dukungan, promosi, dan lainnya. Jika ingin menggunakan twibbon, kita memerlukan sebuah aplikasi software yang menggabungkan antara foto dan twibbon (<https://www.google.com>). Tujuan memilih twibbon untuk melakukan kampanye antikorupsi, karena twibbon jadi *tren* yang mudah diterima, dan diikuti oleh pengguna media sosial. Anak muda juga banyak yang tertarik untuk mencobanya.



Gambar 10. Beberapa contoh postingan twibbon kampanye antikorupsi di media

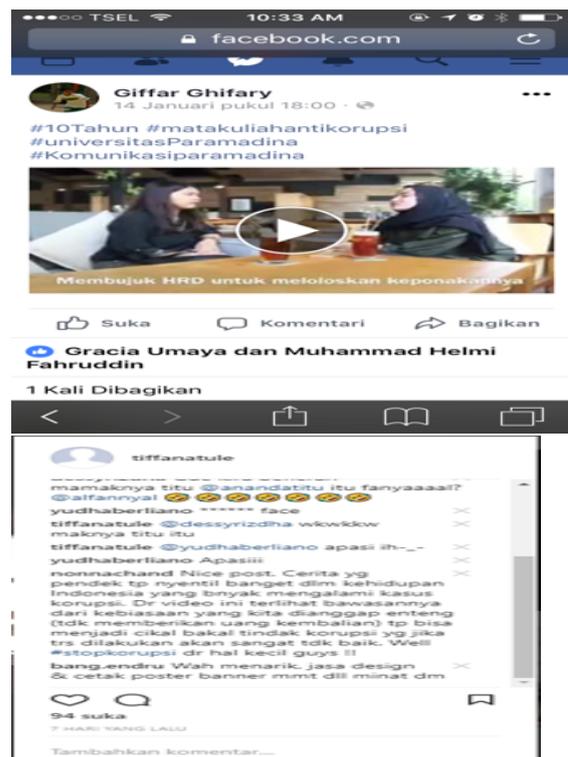
sosial

Kedua, kampanye antikorupsi melalui poster. Memilih poster sebagai bentuk kampanye antikorupsi, karena poster disukai oleh anak muda. Selain itu, poster yang *eye catching*, dan kreatif, membuat anak muda lebih tertarik. Ide poster yang dibuat menggambarkan bagaimana situasi dunia politik di Indonesia. Sementara konsep poster ini menggambarkan bangsa ini, sedang digrogoti oleh tikus-tikus berdasi yang berada di pemerintahan Republik Indonesia. Salah satu tikus berdasi ada pada poster tersebut. Alasan mahasiswa menampilkan wajah koruptor dilatarbelakangi oleh kasus korupsi yang menjerat dirinya, dan mahasiswa berharap dengan ditampilkannya poster ini di muka umum akan membuat koruptor merasa malu dengan apa yang dilakukannya. Korupsi proyek E-KTP merupakan salah satu kasus korupsi terbesar yang terjadi di Indonesia, sehingga cukup *booming* di tahun 2017. Melalui poster ini, diharapkan mampu membangun semangat generasi muda untuk mulai *aware* terhadap kondisi politik di negara Indonesia. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya ikut bersuara memperjuangkan hal-hak rakyat. Poster ini diunggah melalui akun media sosial masing-masing anggota kelompok.



Gambar 11. Poster dan postingan poster antikorupsi di media sosial

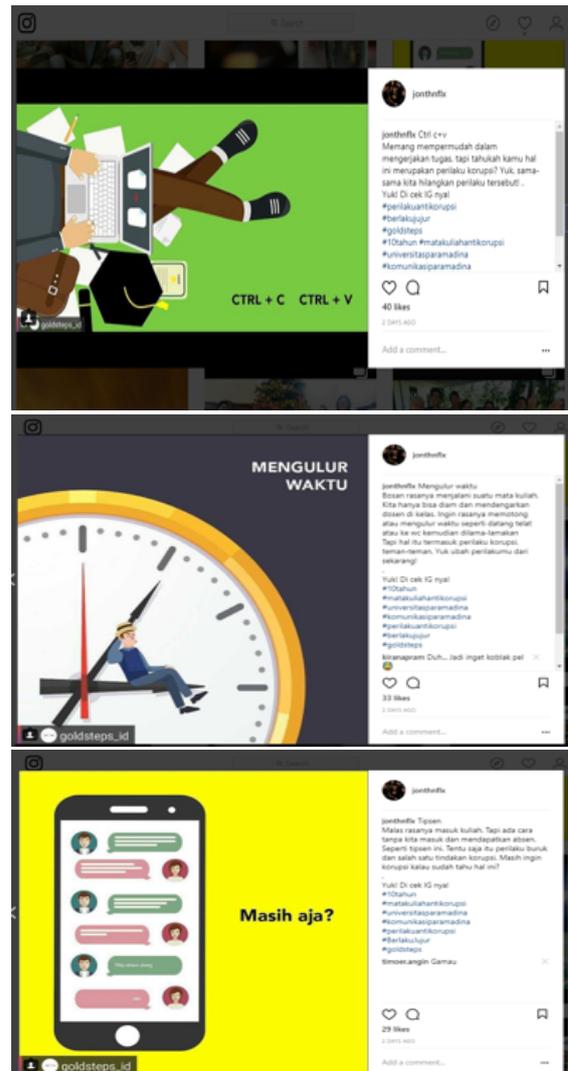
Ketiga, kampanye antikorupsi melalui cerita pendek (video). Ada empat cerita mengenai seorang perempuan muda yang menjalani berbagai aktivitas dalam kesehariannya, tanpa menyadari jika tindakannya tersebut masuk kegiatan korupsi, seperti tidak mengembalikan uang kembalian saat diminta oleh ibunya untuk membeli nasi Padang, menggunakan mobil dinas ibunya untuk keperluan pribadi, yaitu memenuhi panggilan untuk *interview* pekerjaan, melakukan suap kepada tukang parkir untuk mendapatkan tempat parkir, diterima kerja karena tantenya juga bekerja di tempat yang sama (*nepotisme*). Pada bagian akhir dari cerita ini, dimasukan pendidikan antikorupsi, dimana ayahnya menasehati anaknya untuk melakukan segala sesuatu dengan jujur dan berintegritas.





Gambar 12. Film pendek (video) mari berantas korupsi

Keempat, kampanye antikorupsi melalui gambar. Gambar pertama berjudul Ctrl C + Ctrl V, menyampaikan hal yang sering terjadi ketika pelajar atau mahasiswa menerima *deadline* tugas dan tidak sempat lagi untuk membuat tugas. Mereka mencari tugas yang sama di internet, menyalin, lalu mengakui itu adalah hasil kerja mereka. Gambar kedua, berjudul mengulur waktu. Hal ini terjadi ketika mahasiswa bosan dengan matakuliah yang ada, dan mencoba keluar dari kelas, lalu berlama-lama melakukan kegiatan di luar kelas, mengulur waktu hingga matakuliah tersebut selesai dan terasa cepat. Gambar ketiga, menitipkan absen. Hal ini terjadi saat mahasiswa tidak lagi memiliki jatah untuk mangkir dari kuliah, sehingga mencoba untuk menitip absen ke temannya di kelas, agar supaya tampak tetap menghadiri kelas, padahal sebenarnya tidak masuk.



Gambar 13. Tiga gambar dengan tema masing-masing mengenai antikorupsi yang dimuat di media sosial

Kelima, adalah kampanye menggunakan *interactive game*. Bentuknya seperti gambar bergerak yang memiliki tombol (*button*). Jika tombol ditekan, ada 1 kata yang mewakili kata koruptif yang keluar atau muncul, misalnya kata “bohong”. Maka kita harus memposting kata “bohong” dan berbagi pengalaman mengenai hal itu, pernah atau tidak terjadi dalam kehidupan kita, bagaimana perasaan kita dalam melakukan hal itu, lalu kita merespon bahwa hal itu merupakan perilaku koruptif.

**Timescales (skala waktu)**, pelaksanaan kampanye antikorupsi di media sosial adalah 3 minggu. Setelah diinformasikan oleh dosen mengenai soal UAS yaitu kampanye di media sosial, setiap kelompok sudah harus memikirkan bentuk kampanye yang harus dilakukan. Seminggu adalah jadwal untuk mulai memikirkan ide, dan konsep yang diinginkan. Lalu memasuki awal minggu kedua, kelompok sudah mulai *publish* materi kampanye antikorupsi yang mereka buat. Pada minggu yang sama, dosen akan mengevaluasi sudah sampai dimana setiap kelompok melakukan kegiatan kampanyenya. Dosen akan memantau materi kampanye yang sudah *publish* di media sosial, sudah mendapat respon atau tidak dari yang menyaksikannya. Pada akhir minggu ketiga, mahasiswa mengumpulkan laporan kampanye antikorupsi yang sudah dibuat, termasuk respon kampanye antikorupsi yang telah didapatkan di media sosial.

**Evaluations (penilaian)**, dosen akan melakukan penilaian hasil kampanye antikorupsi masing-masing kelompok di media sosial dengan pertimbangan penilaian sebagai berikut : pertama, ide dan konsep kampanye harus orisinal, tidak menjiplak karya orang lain; kedua, laporan kampanye harus detail mengenai tahapan yang dilakukan terkait kampanye; ketiga, jumlah yang merespon kampanye di media sosial; keempat, bentuk respon di media sosial; kelima, cara mahasiswa memberikan respon. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan dosen : pertama, ide dan konsep kampanye mahasiswa menarik dan kreatif; kedua, laporan kampanye yang diserahkan mahasiswa memuat tahapan yang dilakukan mahasiswa, sejak menghadirkan ide dan konsep kampanye, implementasi, hingga mengunggah kampanye di media sosial; ketiga, jumlah yang merespon kampanye antikorupsi mahasiswa di media sosial

beragam, karena mahasiswa mengunggah kampanye pada akun pribadi mereka. Berdasarkan hasilnya, bagi mahasiswa yang memiliki banyak teman di media sosial, responnya akan maksimal, sebaliknya yang memiliki teman terbatas, yang meresponnya juga terbatas jumlahnya. Jumlah yang merespon juga bergantung pada waktu unggah kampanye. Bagi kelompok mahasiswa yang mengunggah kampanye antikorupsi di media sosial lebih awal dan waktunya lebih lama, mendapat respon lebih banyak. Sementara yang mengunggah kampanye antikorupsi mendekati batas akhir waktu yang ditentukan, responnya sedikit; keempat, respon di media sosial beragam, ada yang *like*, menggunakan *emoticon*, *comment*, bahkan ada *share* kampanye tersebut. Bentuk respon beragam, mulai dari yang serius, bercanda, positif, negatif, setuju, ada yang menceritakan pengalaman yang sama sebagai bentuk dukungan pada kampanye antikorupsi.

**Review (peninjauan)** terhadap kampanye antikorupsi di media sosial, kelebihanannya mahasiswa berhasil mengimplementasikan materi antikorupsi ke dalam ide dan konsep kampanye yang kreatif dan sesuai dengan penerimaan anak muda di media sosial. Sejumlah anak muda yang merespon unggahan kampanye antikorupsi dengan serius di media sosial menunjukkan bahwa mereka *aware* (perduli) dengan kondisi yang ada (korupsi), mulai memahami tindakan korupsi, dan berharap untuk ikut gerakan antikorupsi (tidak melakukan korupsi). Walaupun di sisi lain, masih terdapat respon yang menunjukkan ketidakpedulian. Sebagian kelompok yang menggunakan media sosial yang khusus dibuat untuk mengunggah kampanye antikorupsi, adalah kelompok yang paling sedikit mendapat respon.

### 3. Media Sosial

Kehadiran internet, erat kaitannya dengan istilah media baru (*new media*). Ciri utama media baru menurut McQuail (2011:43 ) adalah “saling keterhubungan, aksesnya terhadap khalayak individu sebagai penerima maupun pengirim pesan, interaktivitasnya, kegunaan yang beragam sebagai karakter yang terbuka dan sifatnya yang ada dimana-mana”. Beberapa media yang dianggap sebagai media baru adalah internet, dengan begitu banyak aplikasinya, seperti situs, email, blog, situs jejaring sosial, game *online*, *e-books*, koran *online*, situs berbagi video dan lain sebagainya. “Teknologi media baru juga memberikan peluang bagi mereka yang memiliki selera untuk melakukan perubahan isi media, seperti blog, facebook, portal, dan catatan harian video Youtube (Berger dkk, 2015 : 381). Pengertian facebook bukan hanya sekedar situs yang menyediakan informasi berupa buku muka penggunanya saja. Lebih dari itu, facebook merupakan situs yang menghadirkan layanan jejaring sosial dimana para penggunanya dapat saling berinteraksi dengan para pengguna lainnya yang berasal dari penjuru dunia. Situs jejaring sosial ini, penggunaannya dapat mengunggah berbagai informasi mengenai dirinya sehingga para pengguna facebook lainnya dapat mengetahui informasi tersebut untuk lebih mengenal pemilik akun tersebut. Tidak hanya itu, para pengguna akun facebook juga dapat saling mengomentari berbagai hal seperti tulisan status, atau informasi lainnya yang mereka bagikan dalam situs jejaring sosial ini. Ide situs jejaring sosial facebook pertama kali berasal dari sebuah situs web facemash yang terlebih dahulu didirikan oleh Mark Zuckerberg. Karena kepopuleran situs

facemash ini, akhirnya Mark pun berpikiran untuk menciptakan situs jejaring sosial Facebook. Situs facebook pertama kali diluncurkan pada 4 Februari 2004 dengan nama “TheFacebook” yang berubah dengan menghilangkan “The”nya. Awalnya keanggotaan situs jejaring sosial ini dibatasi hanya untuk mahasiswa pemilik akun Harvard.edu saja. Seiring berjalannya waktu, situs jejaring sosial ini diperluas jangkauannya hingga ke berbagai negara, dan telah merambah ke seluruh penjuru dunia (<https://pengertiandefinisi.com/pengertian-facebook-dan-sejarah-pendirian-facebook/> diakses pada 25 Februari 2019, pukul 22.00 wib).

Instagram tergolong aplikasi media sosial yang sangat populer dan mulai menandingi aplikasi lainnya seperti Facebook, Twitter, BBM, dan masih banyak lagi. Instagram merupakan suatu aplikasi sosial media yang berbasis android untuk *smartphone*, IOS dan iPhone, Blackberry, Windows Phone, dan yang terbaru saat ini juga bisa dijalankan di komputer atau PC. Namun untuk penggunaan di komputer, tidak akan bisa sama sepenuhnya dengan yang ada pada perangkat *mobile phone*. Pada umumnya orang-orang menggunakan Instagram untuk saling berbagi atau berbagi foto maupun video. Prinsip Instagram cenderung berbeda dengan aplikasi media sosial lainnya yang menekankan pada penggunaan kata-kata atau status untuk dibagikan ke publik. Seperti aplikasi media sosial lain, Instagram mencari banyak teman dengan menggunakan istilah *follow* dan *follower* atau mengikuti dan pengikut. Banyaknya follower menandakan akun seseorang sudah memiliki banyak teman. Interaksi bisa dilakukan dengan kegiatan *like* atau saling *comment* pada

postingan. Dapat pula menggunakan *direct message* (DM) dan yang paling populer saat ini adalah *instastory*, berupa aktivitas membagikan video secara *live* atau langsung. Awalnya Instagram bernama burbn didirikan oleh perusahaan bernama Burbn Inc., dipelopori dua CEO yakni Mike Krieger dan Kevin Systrom tahun 2010. Burbn Inc merupakan perusahaan *startup* yang bergerak di bidang pengembangan aplikasi *mobile phone*. Awalnya, aplikasi ini hanya dapat digunakan oleh Iphone dan memiliki banyak fitur yang dikurangi menjadi aplikasi untuk share foto, komentar, dan *like*. Ini awal mula terbentuknya Instagram. Tahun 2012 akhir, perusahaan facebook secara resmi mengambil alih pengelolaan Instagram. Tahun 2016 logo resmi instagram diubah dan diperkenalkan ke publik (<https://www.nesabamedia.com/pengertian-instagram/> diakses pada 25 Februari 2019, pukul 22.30 wib).

#### 4. Evaluasi Kampanye Antikorupsi

Mengakhiri matakuliah antikorupsi, koordinator matakuliah dan pengajar antikorupsi melakukan evaluasi untuk metode yang telah digunakan, salah satunya adalah kampanye di media sosial. Penting bagi universitas Paramadina untuk mengelola kampanye antikorupsi mahasiswa lebih serius dengan membuat facebook dan instagram untuk menampung karya-karya mahasiswa yang meramaikan kampanye antikorupsi. Semua mahasiswa yang mengikuti matakuliah antikorupsi diwajibkan memfollow situs jejaring sosial facebook dan instagram yang dibuat untuk meramaikan matakuliah antikorupsi. Waktu untuk mengerjakan kampanye juga sebaiknya diperpanjang untuk meningkatkan *aware respon* dari mereka

yang *follow* situs jejaring sosial tersebut. Kampanye akan lebih hidup jika apa yang *dishare* di media sosial mengenai antikorupsi, dapat diimplementasikan langsung kepada masyarakat.

#### KESIMPULAN

Metode kampanye antikorupsi di media sosial, terbilang metode baru, tetapi mampu menjadi metode pembelajaran favorit bagi mahasiswa Universitas Paramadina. Melalui metode ini, mahasiswa mampu mengembangkan kreativitas dalam mengkonsepkan gerakan antikorupsi yang sesuai dengan persepsi anak muda. Bentuk kampanye untuk antikorupsi juga beragam, dengan tampilan yang menarik, sehingga menggugah perhatian anak muda yang melihatnya. Masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan metode ini, tetapi berbagai usaha untuk perbaikan akan dilakukan, agar supaya selanjutnya metode ini lebih berhasil dalam implementasinya.

#### REFERENSI

- Ardianto, E., Komala, L., & Karlinah, S. (2004). *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Simbiosis Rekatama Media. Bandung.
- Baran, Stanley J. 2012. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jilid 2 Edisi 5. *Melek Media & Budaya*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Berger, Charles R, dkk. 2015. *Handbook Ilmu Komunikasi*. Nusa Media. Bandung
- Budiargo, Dian. 2015. *Berkomunikasi Ala Net Generation*. PT Elex Media Koputindo. Jakarta.

Helmanita, Karlina dan Sukron Kamil. 2011. *Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi*. Center for the Study of Religion and Culture (CSRC). Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah. Cetakan Kedua, Juni 2011. Jakarta.

Kriyantono, Rachmat. 2009. *Teknik Praktis, Riset Komunikasi, Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

McQuail, Denis. 2011. *Teori Komunikasi Massa Mc Quail*. Salemba Humanika : Jakarta.

Mulyana, Deddy. 2008. *Komunikasi Massa : Kontroversi, Teori, dan Aplikasi*. Widya Padjadjaran. Bandung.

Rosady, Ruslan. 1997. *Kampanye Public Relations, Kiat dan Strategi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Venus, Antar. 2004. *Manajemen Kampanye, Panduan teoritis dan Praktis Dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*. Simbiosis Rekatama Media. Bandung.

Wijayanto dan Ridwan Zachrie. 2009. *Korupsi Mengorupsi Indonesia. Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Cetakan Pertama. Jakarta